

PERILAKU KOMUNIKASI RISIKO DALAM FASE KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT BENCANA BANJIR DI ACEH BARAT

Yuhdi Fahrimal¹, Asmaul Husna², Fathayatul Husna³

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar

Abstract

Floods are the most frequent type of natural disaster in Indonesia. Sometimes floods come together with landslides which causing even greater losses and damage. The knowledge and information gap between government and community is one of the problems that makes it difficult to achieve effective management of disaster relief. The effectiveness of disaster management will be achieved if preparedness grows in the community. As the main actor in disaster management, community preparedness needs to be developed through various integrated and sustainable activities. This study was conducted to determine the risk communication of Blang Beurandang Village, Johan Pahlawan District, West Aceh Regency community in the flood disaster preparedness phase. This study discusses two main explanations, specifically the reality of flooding and identification of community risk communication behavior in the flood disaster preparedness phase using a risk communication perspective. This identification is needed to develop strategic communications that can be useful in bridging the topics of communication that have been occurring between the government and the community. Using a phenomenological perspective, this study was conducted on September until December 2022. Based on the results of this study it is known that the intensity of flooding in Blang Beurandang Village occurs between 2 to 3 times a year. The non-functioning drainage and flood-prone geographic location further exacerbating the effects. Insufficient risk information and absence of early warning system in the pre-disaster phase encourages people to be indifferent resulting in failure to respond when it occurs. Indeed the fulfillment of information needs is carried out independently by the community. Whereas, during the emergency response phase the information are adequate. Reflecting on this condition, it is necessary to revise risk-based disaster management at the local government level by incorporating social media-based data analysis to prevent dis-information that increases fear in the community.

Keywords

Bencana, Kesiapsiagaan, Kesenjangan Informasi, Komunikasi Risiko.

Email

asmaulhusna@utu.ac.id

PENDAHULUAN

Banjir menjadi salah satu jenis bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia. Terkadang banjir datang bersamaan dengan tanah longsor yang menyebabkan kerugian dan kerusakan semakin besar. Beberapa penelitian mengidentifikasi penyebab tingginya risiko bencana banjir ini, antara lain, *pertama* secara geografis posisi Indonesia berada di wilayah tropis. Posisi wilayah ini menyebabkan Indonesia mengalami intensitas hujan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lainnya. Berdasarkan riset Tangang *et al.*, (2017) Indonesia memiliki curah hujan antara 1000mm hingga 5000mm yang merata hampir di seluruh daerah Indonesia. Curah hujan tinggi sekitar 2000mm sampai dengan 3000 mm terjadi pada bulan November hingga April setiap tahunnya (Setiawan, 2021).

Kedua, Indonesia memiliki banyak sungai besar yang beberapa diantaranya bahkan melintasi antar-provinsi. Indonesia tercatat memiliki 5.590 sungai induk dimana 600 diantaranya

berpotensi menyebabkan banjir (Lakawa, 2020; Sinaturi, 2022). Banyak sungai-sungai besar ini menjadi sumber mata pencarian penduduk setempat. Namun aktivitas sepanjang kawasan sungai telah membuat ketahanan sungai menjadi berkurang. Aktivitas tidak bertanggungjawab telah merusak kawasan hulu hingga hilir sungai seperti pertambangan, *illegal logging*, alih fungsi lahan pertanian, dan lain sebagainya (Rosyidie, 2013; Mane, 2019; Handayani *et al.*, 2020). Aktivitas-aktivitas di kawasan sungai tersebut membuat daya tampung sungai menjadi berkurang sehingga saat terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, sungai tidak mampu lagi menampung debit air yang melimpah. Akibatnya limpasan air memasuki pemukiman, merusak harta benda, dan mengancam nyawa penduduk. Setidaknya ada sekitar 1,4 juta wilayah yang dilingkupi oleh sungai-sungai besar berada dalam kondisi rawan banjir (Haryono *et al.*, 2012).

Ketiga, perubahan iklim akibat pemanasan global. Dampak dari perubahan iklim ini bagi negara kepulauan seperti Indonesia tidak hanya kekeringan yang disebabkan oleh kekeringan dan kebakaran lahan seperti yang disebabkan oleh fenomena *El Niño Southern Oscillation* (ENSO) (Field *et al.*, 2016) namun juga menyebabkan terjadinya badai tropis yang meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, puting beliung, dan tanah longsor (Ampou *et al.*, 2017; Hendrawan *et al.*, 2019). Kombinasi dari ketiga faktor tersebut membuat banyak wilayah Indonesia memiliki tingkat kerentanan banjir yang tinggi. Tidak jarang banjir menyebabkan kerugian serta kerusakan yang cukup parah. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sepanjang tahun 2022 telah terjadi sebanyak 3.531 peristiwa bencana alam. Banjir menjadi bencana yang paling banyak terjadi, yaitu, 1.524 kejadian atau setara dengan 43,1% kejadian bencana nasional (Annur, 2023). Banjir menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Sebagai gambaran dampak banjir yang melanda Jakarta pada tahun 2007 menyebabkan kerugian hingga Rp5,16 triliun akibat terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat (Nugroho, 2008)

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan tingkat risiko tinggi terhadap bencana banjir. Salah satu daerah yang sering mengalami peristiwa banjir berulang adalah Desa Blang Beurandang di Kabupaten Aceh Barat. Terkadang banjir terjadi lebih dari satu kali dalam satu tahun. Secara topografi Desa Blang Beurandang berada di dataran rendah dan dialiri oleh Sungai Leuhan yang merupakan anak sungai dari *Krueng Meureubo*. Dalam waktu-waktu tertentu dimana intensitas hujan tinggi, luapan Sungai Leuhan merendam pemukiman warga dan akses jalan lintas kabupaten. Salah satu kejadian banjir yang cukup parah terjadi pada 29 Juli 2020. Air merendam pemukiman penduduk hingga ketinggian 1 meter. Banjir juga menggenangi badan jalan kawasan lintas Meulaboh-Tutut seperti di Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, hingga ke Alue Tampak, kecamatan Kaway XVI. Kondisi ini menyebabkan akses jalan terputus dan tanah amblas yang menyebabkan rumah warga rusak parah. Di samping itu kerugian diperkirakan mencapai Rp45 juta rupiah dan menyebabkan masyarakat mengungsi untuk beberapa waktu (Bahri, 2020).

Masyarakat Desa Blang Beurandang merupakan masyarakat yang heterogen baik dari aspek sosio-kultural maupun ekonomi. Kondisi ini terjadi pasca-tsunami melanda Aceh pada Desember 2004. Wilayah pesisir Aceh Barat yang terkena dampak tsunami menyebabkan hilangnya sebagian daratan dan tidak bisa ditinggali kembali. Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Aceh Barat mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi masyarakat ke daerah yang jauh dari pesisir. Oleh karenanya Desa Blang Beurandang menjadi salah satu pilihan relokasi. Mobilisasi penduduk dalam jumlah besar ini menyebabkan kebutuhan lahan tempat tinggal semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat mulai

mendirikan bangunan di wilayah yang rawan banjir. Terlebih jika ditinjau dari struktur tanah, wilayah daratan Aceh Barat didominasi oleh daerah gambut dan rawa yang menyebabkan kerentanan meningkat.

Manajemen penanggulangan bencana khususnya banjir di Aceh Barat memiliki tantangan yang cukup besar. Kesenjangan pengetahuan dan informasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu masalah yang membuat sulitnya mencapai manajemen penanggulangan bencana yang efektif (Maarif *et al.*, 2012). Di satu sisi pemerintah cenderung hanya berfokus pada pendekatan struktural-teknis dengan membangun tanggul di sempadan sungai dan pengerukan untuk mengurangi sedimentasi sungai (Alfaisal *et al.*, 2017; Zevri, 2020). Di sisi lain masyarakat yang berada di area rawan bencana memiliki konstruksi pengalaman dan pengetahuan masyarakat terhadap bencana sebagai rutinitas menjadi aspek yang menghambat tercapainya penanggulangan bencana yang efektif (Oliver-Smith *et al.*, 2019).

Di level masyarakat, kesenjangan pengetahuan dalam manajemen bencana dipengaruhi oleh pengetahuan yang mereka miliki. Bagi masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan secara kontinu cenderung lebih mampu menghadapi peristiwa bencana. Demikian pula sebaliknya dengan masyarakat yang memiliki kapasitas respon rendah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan untuk merespon bencana secara efektif (Al Thobaity *et al.*, 2015). Kondisi kesenjangan perspektif dalam penanggulangan bencana ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di negara-negara Uni Eropa. Riset Albris *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa kesenjangan antara sains kebencanaan yang dikelola oleh para peneliti dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana. Hambatan-hambatan yang terjadi antara lain dipengaruhi oleh transfer pengetahuan, keahlian bencana, dan kesadaran terhadap risiko. Riset Kusumasari & Alam (2012) menemukan bahwa kemampuan pemerintah daerah dan kebutuhan untuk mengelola bencana merupakan isu yang sangat penting untuk mengeksplorasi peran penting pemerintah daerah dalam kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, respon dan pemulihan bencana, khususnya dalam kaitannya dengan karakteristik pemerintah daerah di negara berkembang.

Efektivitas penanggulangan bencana tercapai jika kesiapsiagaan tumbuh di masyarakat. Sebagai aktor utama dalam penanggulangan bencana, maka kesiapsiagaan masyarakat perlu ditumbuhkan melalui beragam aktivitas yang terintegrasi dan berkesinambungan. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 disebutkan bahwa kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Winoto & Zahroh, 2020). Dalam kerangka tersebut dapat dipahami bahwa tindakan kesiapsiagaan merupakan aktivitas bersama dan berkesinambungan antara pemerintah, aktivis lingkungan, akademisi, lembaga swasta, dan masyarakat. Menurut Utami *et al.* (2021) kesiapsiagaan bencana meliputi tiga indikator, yaitu, (1) pengetahuan atau *Knowledge*; (2) perencanaan kedaruratan atau *Emergency Planning*; dan (3) sistem peringatan dini/ *Warning System*.

Komunikasi risiko memainkan peran yang semakin sentral dalam manajemen risiko bencana. Menurut Demeritt & Nobert (2014) komunikasi risiko menjadi aspek penting dalam penanggulangan banjir seiring dengan perubahan paradigma penanganan banjir dari teknis menjadi manajemen berbasis risiko yang lebih terintegrasi. Komunikasi risiko telah mengintegrasikan secara komprehensif berbagai konsep dan model yang sangat penting dalam

rangka mempersiapkan masyarakat tangguh bencana seperti persepsi risiko, respons perilaku, dan manajemen kelembagaan.

Komunikasi risiko ditujukan untuk menyampaikan informasi risiko kepada individu dan komunitas yang rentan sehingga meningkatkan kesadaran mereka akan risiko yang dialaminya (Renn, 2020). Dalam dua dasawarsa terakhir, riset komunikasi risiko telah banyak digunakan dalam berbagai bidang penelitian baik bencana alam (Prathumchai & Bhula-or, 2020; Yudarwati *et al.*, 2022), kesehatan (Abrams & Greenhawt, 2020; Dehghani *et al.*, 2022), maupun perubahan iklim (Patrianti *et al.*, 2020; Reyes *et al.*, 2021). Semua riset yang diidentifikasi menyimpulkan bahwa komunikasi risiko berguna dalam mengubah persepsi risiko publik, meningkatkan kesadaran mereka tentang ancaman dan bahaya lingkungan, serta menumbuhkan langkah preventif agar terhindar dari dampak bencana yang lebih luas. Kekhasan perspektif komunikasi risiko adalah perkembangan perspektif dari berfokus pada pemangku kebijakan hingga mempertimbangkan dimensi sosio-kultural masyarakat.

Perspektif komunikasi risiko telah berkembang dari berfokus pada manajemen strategi komunikasi pemerintah sebagai aktor penanggulangan bencana menjadi berfokus pada perilaku komunikasi masyarakat (Maidl & Buchecker, 2015). Perilaku komunikasi risiko di level masyarakat menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut terlebih dalam kaitannya dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Masyarakat biasanya mengembangkan komunikasi risiko melalui berbagai saluran yang tersedia dan mudah diakses. Riset Wardyaningrum (2016) menyatakan bahwa jaringan komunikasi merupakan perwujudan dari modal sosial inklusif yang dimiliki oleh masyarakat desa. Relasi personal yang terjadi baik antara masyarakat dengan relawan, tim SAR, LSM, pemerintah daerah, maupun dengan Keraton Yogyakarta telah memfasilitasi arus informasi kesiapsiagaan bencana. Relasi ini juga mempengaruhi agen yang berperan sebagai pengambil keputusan dan mendukung kredibilitas individu untuk mendapatkan akses sumber daya dan sebagai pembangun identitas dan modal sosial inklusif adalah pengakuan masyarakat lokal.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui komunikasi risiko masyarakat Desa Blang Beurandang dalam fase kesiapsiagaan bencana banjir. Makalah ini akan membahas dua penjelasan utama, yaitu, *pertama* realitas banjir di Desa Blang Beurandang. Penjelasan ini didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang dirasakan masyarakat saat berhadapan dengan banjir yang berulang. Pengalaman dan pengetahuan menjadi faktor penting dalam kajian bencana karena menumbuhkan efikasi diri dalam berhadapan dengan bencana. Pengalaman dan pengetahuan membentuk memori jangka panjang yang berguna dalam strategi respon masyarakat saat bencana serupa terjadi di masa depan. *Kedua*, penelitian ini mengidentifikasi perilaku komunikasi risiko masyarakat dalam fase kesiapsiagaan bencana banjir. Perilaku komunikasi risiko ini diidentifikasi melalui kebutuhan informasi dan ketersediaan informasi dalam fase kesiapsiagaan banjir di masyarakat Desa Blang Beurandang dengan menggunakan perspektif komunikasi risiko. Identifikasi ini diperlukan untuk menyusun strategi komunikasi yang bisa berguna dalam menjembatani kesenjangan komunikasi yang selama ini terjadi antara pemerintah dan masyarakat.

KAJIAN TEORITIK

Komunikasi Risiko Dalam Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana

Manajemen bencana merupakan suatu proses siklis yang berkesinambungan dan terpadu dari perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan pelaksanaan langkah-langkah untuk

mencegah dan mengelola bencana secara efektif (Math *et al.*, 2015). Manajemen bencana yang efektif dilakukan bertujuan untuk melindungi penduduk beserta harta benda mereka dari ancaman bencana. Secara umum, manajemen bencana terdiri atas empat fase utama, yaitu, (1) mitigasi; (2) kesiapsiagaan; (3) respon; dan (4) pemulihan (Adiyoso, 2018). Dalam paradigma baru manajemen bencana, kesiapsiagaan merupakan dimensi penting untuk dikembangkan oleh individu, komunitas, dan lembaga pemerintah (Hidayati, 2008). Menurut Hidayati (2008) dalam konteks Indonesia, paradigma kesiapsiagaan baru disadari sebagai sesuatu yang penting setelah bencana gempa dan tsunami melanda Aceh tahun 2004. Saat bencana tsunami Aceh terjadi, banyak masyarakat yang menjadi korban karena tidak memiliki pengetahuan dan kapasitas yang memadai untuk menghindari dari bencana.

Kesiapsiagaan merupakan langkah-langkah yang memungkinkan berbagai unit seperti rumah tangga, individu, organisasi, komunitas, dan masyarakat untuk merespon secara efektif dan pulih lebih cepat ketika bencana terjadi. Konsep kesiapsiagaan bencana meliputi tindakan yang ditujukan untuk meningkatkan keselamatan jiwa ketika terjadi bencana (Danar, 2020). Misalnya saat bencana banjir terjadi pada komunitas yang telah memiliki kesiapsiagaan yang memadai maka secara efektif mampu mengembangkan peringatan dini dan perlindungan sebelum banjir datang. Di samping itu, konsep kesiapsiagaan juga dirancang untuk meningkatkan kemampuan individu untuk melakukan tindakan kedaruratan guna melindungi harta benda mereka dari kerusakan dan gangguan yang ditimbulkan bencana. Dalam fase pemulihan bencana, kesiapsiagaan berguna untuk mendorong tumbuhnya kemampuan individu dan komunitas guna terlibat dalam kegiatan pemulihan pasca-bencana.

Kegiatan yang umumnya terkait dengan kesiapsiagaan bencana, yaitu, (1) mengembangkan proses perencanaan untuk memastikan kesiapan; (2) merumuskan rencana bencana; (3) menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk respons yang efektif; dan (4) mengembangkan keterampilan dan kompetensi untuk memastikan kinerja yang efektif dari tugas-tugas terkait bencana. Terdapat beberapa elemen yang terkait dengan kesiapsiagaan bencana yang dikembangkan oleh *Federal Emergency Management Agency* (FEMA) dan *National Emergency Management Association* (NEMA), meliputi (1) Hukum dan otoritas; (2) Identifikasi bahaya dan penilaian risiko; (3) Mitigasi bahaya; (4) Pengelolaan sumber daya; (5) Pengarahan, kontrol, dan koordinasi; (6) Komunikasi dan peringatan; (7) Operasi dan prosedur; (8) Logistik dan fasilitas; (9) Pelatihan, evaluasi, dan tindakan perbaikan; (10) Komunikasi krisis, pendidikan publik, dan informasi; (11) Keuangan dan administrasi.

Dalam dua dekade terakhir, komunikasi telah diakui sebagai elemen penting dalam manajemen bencana. Kerangka manajemen risiko bencana yang dikembangkan oleh *International Risk Governance Council* (IRGC) memasukkan komunikasi sebagai konsep sentral yang menghubungkan seluruh tahapan manajemen bencana (Renn & Walker, 2008). Dalam studi kebencanaan, komunikasi tidak hanya dipandang dapat memberikan informasi dan mengubah perilaku masyarakat yang rentan menjadi lebih waspada. Komunikasi mereduksi ketidakpastian melalui penyusunan pesan-pesan yang sesuai dengan kebutuhan publik. Menurut Hardiyanto & Pulungan (2019) menyatakan bahwa komunikasi sebagai bentuk interaksi manusia hadir sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketidakpastian. Dalam situasi bencana informasi yang akurat dibutuhkan baik oleh masyarakat untuk melakukan respon secara tepat saat bencana terjadi.

Komunikasi risiko ialah proses pertukaran informasi secara terus-menerus, baik langsung ataupun tidak langsung dengan pemberitaan yang benar dan bertanggung jawab yang terbuka

dan interaktif atau berulang di antara individu, kelompok serta lembaga (Balog-Way *et al.*, 2020). Komunikasi risiko yang efektif harus dilakukan secara terbuka, interaktif, serta transparan. Karakteristik risiko yang diperoleh dari penilaian risiko serta pengendalian risiko atau kebijakan yang akan diimplementasikan, harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait sehingga semua pihak yang terkait memperoleh informasi yang cukup mengenai pencegahan dan tindakan tepat yang harus dilakukan (Demeritt & Nobert, 2014).

Penting untuk menyadari bahwa gagasan dan tujuan komunikasi risiko adalah untuk menyediakan informasi yang relevan terkait bencana sehingga menumbuhkan perilaku kesiapsiagaan (Badri *et al.*, 2018). Dalam kasus bencana banjir, komunikasi risiko memainkan peran penting dalam pergeseran paradigma yang lebih luas dari pertahanan banjir berbasis teknik ke manajemen berbasis risiko yang lebih terintegrasi (Salman & Li, 2018). Beberapa riset yang telah dilakukan memperlihatkan komunikasi risiko berpengaruh terhadap persepsi risiko, respons perilaku, dan manajemen kelembagaan (Kammerbauer & Minnery, 2019; Chatterjee *et al.*, 2020). Menurut Jensen *et al.* (2017) efektivitas komunikasi risiko ditentukan oleh kemampuan para pemangku kebijakan untuk memahami dan menilai risiko serta mendiseminasikan hal tersebut kepada publik. Kegagalan dalam penilaian risiko hanya akan membuat masyarakat semakin rentan.

Komunikasi risiko merupakan faktor penting dalam menjembatani kesenjangan yang terjadi dalam manajemen bencana (Fakhrudin *et al.*, 2020). Selama ini risiko bencana menjadi domain eksklusif pemerintah dan ilmuwan sehingga publik tidak mendapatkan informasi yang cukup. Pesan-pesan yang dikonstruksi oleh juru bicara pemerintah tidak jarang sulit dipahami oleh masyarakat awam akibat penggunaan istilah teknis. Akibatnya terjadi kegagalan dalam respon publik saat bencana terjadi. Di sisi lain masyarakat mengaktifkan saluran komunikasi tradisional dan jaringan individu untuk menemukan informasi bencana dan langkah penyelamatan saat bencana terjadi (Maidl & Buchecker, 2015).

Hubungan konsep komunikasi risiko dengan kesiapan masyarakat adalah dimana memosisikan masyarakat sebagai peran utama dalam penanggulangan bencana khususnya pada masyarakat yang rentan. Oleh karena itu penting untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana akan adanya ancaman bahaya di sekitar mereka. Sebab secanggih apa pun teknologi untuk mendeteksi bencana, apabila tidak diimbangi dengan perilaku sadar dan siaga terhadap bencana dari masyarakat, maka pemanfaatannya tidak akan optimal. Konsep komunikasi risiko didasari pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional dan menggunakan informasi yang mungkin baginya secara sistematis. Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu.

Komunikasi sangat penting untuk memahami dan mengelola krisis dalam dua cara, yaitu, *pertama* komunikasi diperlukan untuk membuat makna seputar peristiwa yang sangat tidak pasti dan samar-samar. *Kedua*, komunikasi sangat penting sebagai bagian dari fungsi manajemen krisis dan risiko (Sellnow & Seeger, 2013). Ini termasuk kegiatan seperti pemindaian lingkungan untuk risiko, menciptakan respons yang efektif, menyelesaikan krisis, dan mempelajari pelajaran dari peristiwa ini. Menurut Seeger (2018) berbagai tindakan dan perasaan yang timbul selama bencana seperti tanggapan yang terkoordinasi, kerja sama, evakuasi dan peringatan, pendidikan risiko, proses perencanaan krisis dan pengambilan keputusan krisis, mengenang dan berduka, menyelesaikan, dan memperbaiki semuanya membutuhkan komunikasi.

Kepercayaan merupakan inti dari komunikasi bencana dan risiko pemerintah yang efektif. Pemerintah perlu mengelola kepercayaan publik dalam manajemen bencana. Tidak jarang respon publik yang bertentangan dengan anjuran pemerintah terjadi akibat rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terlebih di era ekosistem komunikasi yang berkembang pesat seperti ini. Penting bagi pemerintah untuk memahami bagaimana membangun dan memelihara kepercayaan publik agar pemerintah dipercaya sebagai sumber informasi utama (Liu & Mehta, 2021). Berdasarkan laporan *National Academy of Sciences* (2018) bahwa teknologi baru seperti telepon pintar dan *platform* media sosial menawarkan cara baru untuk berkomunikasi dengan publik melebihi apa yang dapat dilakukan oleh saluran komunikasi sebelum era teknologi digital.

Komunikasi dalam fase bencana tidak saja dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tapi juga penting pada fase pra-bencana dan saat bencana. Sebagaimana dikatakan bahwa komunikasi ialah cara terbaik untuk kesuksesan mitigasi bencana, persiapan, respon serta pemulihan situasi pada saat bencana. Komunikasi memegang peranan penting hampir dalam seluruh aktivitas manusia demikian pula dalam penanggulangan bencana, sehingga pengelolaan komunikasi yang efektif harus menjadi perhatian institusi pemerhati bencana terutama institusi pemerintah terkait (Sellnow & Seeger, 2013). Komunikasi risiko bencana memiliki fungsi untuk mengingatkan anggota masyarakat akan bahaya dan risiko bencana, selain itu komunikasi bencana pun memiliki peranan untuk mentransmisikan segala nilai-nilai sosial kultural masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan dan rehabilitasi bencana. Proses komunikasi yang berlangsung tak lagi berupa komunikasi pasif dan statis, tapi lebih jamak berupa bentuk komunikasi transaksional dua arah. Komunikasi dua arah ini dipercaya lebih dinamis dan efektif dalam mendistribusikan informasi kepada masyarakat selama kedaruratan bencana. Melalui formula transaksional ini, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait melakukan transaksi informasi secara terus menerus dan menciptakan pemaknaan bersama atas situasi bencana (Sellnow & Seeger, 2013).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan perspektif fenomenologi untuk menemukannya perilaku komunikasi risiko masyarakat di Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Melalui perspektif fenomenologi ini peneliti menggali dan memahami realitas perilaku komunikasi risiko masyarakat Desa Blang Beurandang yang dikonstruksi melalui pengalaman empiris mereka (Horrigan-Kelly *et al.*, 2016). Penggunaan perspektif fenomenologi telah diakui dalam riset kebencanaan karena keampuannya merekam pengetahuan, pengalaman, bahkan *world of view* individu dan komunitas. Sebagaimana riset Swann *et al.* (2016) menggunakan perspektif fenomenologi empiris ini untuk mengkaji pengalaman para pendaki *Mount Everest* yang selama dari peristiwa gempa besar dan longsor salju pada tahun 2015. Perspektif fenomenologi mengakui bahwa setiap manusia itu unik dan memiliki pengalaman empiris yang berbeda antara satu dengan lainnya (Littlejohn & Foss, 2009; Anshori, 2018). Oleh karenanya tidak berlaku hukum generalisasi dalam penelitian ini. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menghimpun informasi pengetahuan dan pengalaman yang dikonstruksi oleh setiap informan penelitian secara mendalam dan komprehensif.

Penelitian dilakukan selama empat bulan dari September 2022 hingga Desember 2022. Objek penelitian ini adalah perilaku komunikasi risiko masyarakat Desa Blang Beurandang dalam fase kesiapsiagaan bencana banjir. Untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian,

maka unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Blang Beurandang yang dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan (*purposive sampling*), yaitu, (1) penduduk Desa Blang Beurandang yang telah tinggal menetap sekurang-kurangnya lima tahun; (2) berusia di atas 17 tahun; (3) mengalami peristiwa bencana banjir sekurang-kurangnya dua kali selama tinggal menetap di Desa Blang Beurandang; dan (4) mampu mengungkapkan pengetahuan dan pengalamannya terkait banjir yang dialami selama tinggal menetap di Desa Blang Beurandang. Berdasarkan kriteria tersebut maka ditetapkan 10 (sepuluh) orang warga Desa Blang Beurandang yang menjadi informan dengan keterwakilan jenis kelamin dan status sosial ekonomi.

Data dikumpulkan melalui tiga metode, yaitu, *pertama* wawancara mendalam yang dilakukan secara tatap muka di rumah-rumah penduduk. Selama wawancara peneliti menggunakan alat perekam dan buku catatan untuk mencatat detail yang tersirat oleh informan. Data wawancara dan catatan tersebut digunakan sebagai data utama selama proses analisis data. *Kedua*, observasi lapangan dimana peneliti turun ke lokasi penelitian untuk mengambil data kondisi geografis Desa Blang Beurandang. Data observasi ini berguna untuk memperkuat analisis yang dilakukan berdasarkan data hasil wawancara. *Ketiga*, analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan dan melacak dokumen-dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu, *pertama*, data hasil wawancara ditranskripsikan dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang telah ditetapkan seperti (1) penyebab, intensitas, dan dampak banjir di Desa Blang Beurandang; (2) kebutuhan informasi risiko masyarakat Desa Blang Beurandang; dan (3) ketersediaan informasi risiko bagi masyarakat Desa Blang Beurandang. *Kedua*, data yang telah ditranskrip selanjutnya direduksi dengan menekankan detail khusus dan membuang informasi yang tidak berhubungan dengan tujuan penelitian dan kategori yang telah dibuat. *Ketiga*, verifikasi data dilakukan melalui pembacaan berulang hasil analisis dan membandingkannya dengan sumber-sumber lainnya. *Ke-empat*, menarik kesimpulan setelah analisis dan verifikasi data dilakukan melalui teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Banjir di Desa Blang Beurandang

Sejak kebencanaan dipelajari dan dikembangkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan, maka bencana didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang merusak dan mengganggu kehidupan individu dan komunitas (Danar, 2020). Dalam pendefinisian yang bercorak saintifik ini, upaya penanggulangan bencana dibebankan kepada pemerintah dan lembaga terkait. Oleh karenanya tidak jarang pendekatan yang digunakan dalam penanggulangan bencana cenderung bersifat struktural-teknis (Rafliana, 2014). Pada kenyataannya manusia telah mengalami peristiwa bencana selaras dengan lamanya peradaban ada di muka bumi ini (Oliver-Smith *et al.*, 2019). Dalam kultur masyarakat Islam, banjir besar di masa Nabi Nuh a.s. merupakan salah satu bencana alam terbesar bagi umat manusia saat itu dan menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya (Alizaky, 2020). Pada masyarakat Jepang berkembang geomitologi *Namazu*, yakni, sebuah ikan lele raksasa yang mana tubuh ikan lele tersebut ditempati oleh manusia. Saat ikan lele tersebut bergerak, maka terjadilah gempa bumi (Quin, 2021). Di masyarakat kepulauan seperti Simeulue berkembang narasi *Smong*, sebuah hikayat yang berisikan syair-syair tentang gelombang besar dan cara melakukan mitigasi (Rahman *et*

al., 2018). Semua legenda dan mitologi tersebut menunjukkan bahwa bencana memiliki dimensi sosio-antropologi sehingga pendalaman terhadap pengetahuan dan pengalaman masyarakat menjadi sesuatu yang penting. Penyelarasan strategi berdasarkan konstruksi sosio-kultural masyarakat terhadap bencana perlu dipertimbangkan sehingga upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan secara efektif (Gultom, 2016).

Pengalaman individu merupakan aspek penting dalam menyusun strategi penanggulangan bencana. Setiap individu mempunyai pengalaman yang berbeda baik dalam memaknai bencana maupun dalam upaya merespon dan bangkit setelah bencana terjadi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa konstruksi berpikir masyarakat Desa Blang Beurandang terhadap bencana banjir telah terbentuk berdasarkan pengalaman yang selama ini mereka alami. Meskipun konstruksi pengalaman tersebut tidak terbentuk dalam sebuah mitologi dan legenda, namun upaya mitigasi dan kesiapan masyarakat Desa Blang Beurandang telah berkembang selama peristiwa bencana banjir.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa diketahui bahwa secara geografis, Desa Blang Beurandang memiliki kerentanan fisik terhadap banjir. Hal ini dibuktikan oleh beberapa kondisi, yaitu, *pertama* Desa Blang Beurandang berada di wilayah Sungai Leuhan yang menjadi anak sungai *Krueng Meureubo*. Sungai *Krueng Meureubo* merupakan salah satu sungai besar di Aceh Barat. Menurut riset Rezkina (2015) sungai *Krueng Meureubo* memiliki debit air yang cukup besar. Saat musim penghujan tiba, debit air selama banjir meningkat menjadi 207,757 m³/detik sedangkan kapasitas penampungan sungai hanya sebesar 45,433 m³/detik. Ketidaksiharian antara jumlah debit air dan daya tampung sungai menyebabkan limpasan air masuk ke area daratan dan merendam persawahan, perumahan penduduk, dan akses transportasi.

Kedua, drainase yang tidak berfungsi secara baik. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa Desa Blang Beurandang memiliki banyak drainase. Fungsi drainase ini ada dua, yaitu, (1) sebagai saluran irigasi ke persawahan masyarakat dan (2) sebagai penyalur air dari aliran kecil ke saluran sungai utama. Namun penelitian ini mengonfirmasi bahwa kondisi drainase ini tidak optimal. Hal ini dipengaruhi oleh di sepanjang drainase ke saluran utama sungai terjadi penyempitan akibat semak belukar dan pendangkalan akibat endapan lumpur, pasir, dan kerikil. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil riset Satria *et al.* (2015) bahwa banjir di Desa Blang Beurandang disebabkan oleh kondisi saluran atau drainase yang mengalirkan air ke sungai Leuhan tidak berfungsi optimal. Di samping karena penyempitan saluran, panjang saluran ke sungai utama yang cukup panjang mempengaruhi waktu tempuh aliran sungai dari drainase ke sungai *Krueng Meureubo* (Satria *et al.*, 2015).

Intensitas banjir di Desa Blang Beurandang terjadi antara 2 hingga 3 kali dalam setahun tergantung pada intensitas hujan. Risiko banjir semakin meningkat saat musim penghujan, sehingga masyarakat secara mandiri melakukan mitigasi dengan memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Saat air baru dalam bentuk genangan, masyarakat belum melakukan evakuasi diri karena berdasarkan pengalaman masyarakat jika hujan intensitas sedang berlangsung dalam waktu singkat hanya maka tinggi air genangan kurang dari 30 cm. Dalam beberapa peristiwa seperti yang terjadi pada tahun 2020, intensitas hujan yang tinggi selama berhari-hari membuat debit air meningkat. Limpasan air merendam pemukiman dan persawahan dengan ketinggian 100 cm hingga 150 cm. Dalam kondisi ini, menurut informan masyarakat mulai mengevakuasi diri ke rumah keluarga atau kerabat

terdekat. Mereka akan menginap di rumah kerabat dan saudara hingga air benar-benar surut dan kembali ke rumah untuk membersihkan sisa banjir.

Dalam kejadian banjir hanya berbentuk genangan kurang dari 30 cm, masyarakat hanya mengalami kerugian harta benda yang terendam. Namun pada tahun 2020, kejadian banjir tidak hanya mengganggu kehidupan masyarakat seperti kerusakan alat rumah tangga, akses transportasi terganggu, dan anak-anak yang tidak bisa ke sekolah. Banjir yang melanda Desa Blang Beurandang telah menyebabkan korban jiwa dimana anak-anak hanyut akibat aliran sungai yang deras (Bahri, 2020). Meski dampak yang ditimbulkan oleh banjir rutin dirasakan cukup merugikan, namun masyarakat Desa Blang Beurandang masih enggan untuk direlokasi ke tempat lain. Kepemilikan rumah yang turun temurun, akses ke sumber mata pencarian, dan lokasi sekolah anak yang dekat menjadi pertimbangan masyarakat enggan untuk direlokasi.

Oleh karenanya untuk menanggulangi banjir berulang di masa depan maka kesiapsiagaan masyarakat perlu ditingkatkan. Ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan, antara lain *pertama* pendidikan bencana yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Selama ini pendidikan bencana hanya dilakukan secara parsial dan belum berkesinambungan. Kondisi ini dipengaruhi keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku pelaksana penanggulangan bencana di daerah. Padahal peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana perlu ditingkatkan melalui berbagai program pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan secara kontinu. Berdasarkan hasil riset Hoffmann & Muttarak (2017) pengalaman dan pendidikan bencana secara efektif mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di Thailand dan Filipina.

Kedua, manajemen bencana yang terintegrasi dan melibatkan multi-pihak. Secara regulasi, penanggulangan bencana telah memiliki kelengkapan payung hukum sebagai kerangka kerja dari tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, *Qanun Aceh* Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana, dan *Qanun Aceh Barat* Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa tindakan dan aktivitas penanggulangan bencana dilakukan secara terintegrasi lintas sektoral, dari tingkat pusat hingga level daerah, dan melibatkan multi-pihak. Saat terjadi bencana dengan skala yang besar, tidak jarang pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya dan anggaran (Asrofi & Hadmoko, 2017; Sukino *et al.*, 2019). Kondisi ini akan memperparah dampak yang ditimbulkan oleh bencana dan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karenanya melalui pelibatan multi-pihak, keterbatasan tersebut dapat diminimalisir sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan secara efektif, efisien, cepat, dan tepat.

Ketiga, membangun sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Paradigma kesiapsiagaan bencana telah menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam manajemen penanggulangan bencana. Masyarakat merupakan aktor yang paling dekat dengan risiko bencana dan mengalami dampak yang paling besar dari setiap kejadian bencana. Oleh karenanya pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat perlu dikembangkan (Macherera & Chimbari, 2016). Sistem peringatan dini ini dapat menggunakan sistem komunikasi yang selama ini telah dimiliki oleh masyarakat sehingga lebih mudah digunakan dan dipahami oleh masyarakat.

Ke-empat, pengembangan sistem informasi bencana terpadu berbasis teknologi digital. Kehadiran teknologi digital telah mempengaruhi sistem hidup masyarakat dengan mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Teknologi digital menjadi oase bagi keterbatasan saluran komunikasi lainnya seperti interkoneksi yang mengatasi hambatan jarak dan waktu. Dalam temuan penelitian ini, masyarakat Desa Blang Beurandang memiliki perangkat komunikasi digital yang mereka gunakan aktif setiap saat. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem informasi yang berisikan informasi risiko bencana dan diperbaharui informasinya secara berkala. Riset Lai *et al.* (2018) pada masyarakat Asia Tenggara menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki telepon seluler lebih banyak mengakses informasi dari perangkat digital mereka tersebut dan secara efektif memangkas waktu untuk kesiapsiagaan bencana. Sebaliknya masyarakat yang tidak memiliki perangkat seluler justru menggunakan sistem informasi dari jejaring sosial kekerabatan dan teman mereka. Situasi ini tentu saja sangat membatasi jumlah informasi yang dapat mereka jangkau dan kumpulkan.

Perilaku Komunikasi Risiko Masyarakat Menghadapi Bencana Banjir

Perilaku komunikasi risiko dipahami sebagai aktivitas atau tindakan yang mendorong interaksi antar-individu dalam rangka berbagi pesan risiko guna meningkatkan kapasitas dalam merespon bencana. Perilaku komunikasi ini melibatkan dimensi teknis, sosial, dan psikologis. Dalam dimensi teknis, perilaku komunikasi risiko berkaitan dengan interaksi antar-pemangku kebijakan dalam menilai risiko. Hasil penilaian risiko ini berupa strategi penanganan risiko yang dianggap paling mungkin dan paling sesuai dengan konteks bencana. Sementara itu dalam dimensi sosial, perilaku komunikasi merujuk kepada tindakan antar-individu yang melakukan pertukaran informasi risiko bencana dan rencana respon sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki.

Dalam konteks psikologis, perilaku komunikasi risiko ditujukan untuk mendorong perubahan persepsi risiko, mereduksi ketidakpastian, dan meningkatkan efikasi diri individu, komunitas, dan lembaga pemerintah. Persepsi risiko merupakan penilaian subjektif dari probabilitas terjadinya suatu peristiwa bencana dan perhatian terhadap konsekuensi dari peristiwa tersebut (Sjöberg *et al.*, 2004). Menurut Lechowska (2018) persepsi risiko dapat pula dipahami sebagai kemungkinan ancaman bahaya yang dirasakan dan kemungkinan dampak yang dirasakan. Riset Xu *et al.* (2018) menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki persepsi risiko yang tinggi akan memiliki pengetahuan yang memadai terhadap ancaman bencana dan memiliki kesiapsiagaan bencana yang tinggi pula. Secara berbeda riset Aiyuda & Koentjoro (2016) gagalnya sistem mitigasi bencana disebabkan oleh rendahnya persepsi masyarakat terhadap dampak kabut asap selama kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

Dalam konteks penelitian ini digunakan tiga indikator dalam melihat perilaku komunikasi pada masyarakat Desa Blang Beurandang, yaitu, kebutuhan informasi, ketersediaan informasi, dan sumber informasi yang dipercaya. Ketiga indikator tersebut dipertimbangkan sebagai elemen penting dalam riset komunikasi risiko di samping persepsi risiko, ketidakpastian, dan efikasi diri. Deskripsi hasil analisis akan dijelaskan sebagai berikut:

Kebutuhan Informasi Bencana

Kebutuhan informasi bencana berkaitan dengan derajat ketidakcukupan informasi yang dirasakan oleh individu dalam situasi bencana. Oleh karena ketidakcukupan informasi ini,

seseorang sulit untuk menilai situasi dan memberikan respon yang tepat pada situasi bahaya tersebut. Dalam konteks bencana, informasi menjadi kebutuhan dasar bagi individu. Dimensi ketidakpastian dalam bencana akan meningkatkan kebutuhan individu untuk mencari informasi melalui berbagai sumber yang mungkin mereka mampu jangkau (Huurne & Gutteling, 2008). Informasi yang didapatkan akan digunakan untuk menyiapkan diri untuk merespon saat bencana terjadi.

Kebutuhan informasi juga dipengaruhi oleh persepsi risiko bencana. Bagi individu yang mempersepsikan bencana sebagai sesuatu yang tidak begitu penting, maka kebutuhan informasinya pun tidak pula tinggi. Hal ini mendorong proses pencarian informasi risiko bencana tidak akan dilakukan. Demikian pula sebaliknya, saat persepsi risiko bencana tinggi maka kebutuhan informasi akan tinggi pula. Kebutuhan informasi ini akan mendorong orang untuk mencari informasi guna mereduksi ketidakpastian yang tinggi. Riset McCaffrey *et al.* (2013) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kebutuhan informasi antar-penduduk saat terjadi kebakaran hutan di Arizona dan Colorado, Amerika Serikat. Penduduk yang mengungsi akibat kebakaran hutan lebih aktif mencari informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perilaku berbeda ditunjukkan oleh masyarakat yang tidak mengungsi meski mereka tetap membutuhkan informasi luasnya cakupan kebakaran. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua tipe situasi dimana kebutuhan informasi risiko tinggi dan sedang.

Dalam fase sebelum terjadi bencana, kebutuhan masyarakat terhadap informasi bencana berada dalam taraf sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak mencari informasi risiko banjir dan kerentanan fisik lingkungan mereka. Masyarakat mengandalkan situasi alamiah dengan mengembangkan asumsi bahwa intensitas hujan yang tinggi akan menyebabkan banjir. Konstruksi berpikir masyarakat ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap banjir. Dalam konteks kesiapsiagaan bencana, perilaku masyarakat yang acuh terhadap informasi bencana pada fase pra-bencana akan mempengaruhi kegagalan respon saat bencana terjadi. Meskipun demikian, informan masyarakat menyatakan bahwa mereka pernah mendapatkan sosialisasi oleh pemerintah daerah melalui BPBD. Sebagai saluran informasi bencana, BPBD juga memasang papan peringatan daerah rawan banjir di Desa Blang Beurandang.

Kebutuhan informasi meningkat saat bencana terjadi. Berdasarkan pengalaman masyarakat saat bencana banjir terjadi pada tahun 2020, masyarakat membutuhkan informasi terkait dengan evakuasi, lokasi pengungsian, serta bantuan makanan dan obat-obatan. Pemenuhan kebutuhan informasi ini dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui sumber yang memungkinkan untuk mereka jangkau seperti kerabat dan saudara yang tidak terkena dampak bencana. Menurut informan, air limpasan yang tinggi menyebabkan evakuasi sulit dilakukan tim siaga bencana. Masyarakat memilih untuk bertahan di rumah dengan naik ke tempat yang tinggi hingga bantuan evakuasi datang. Untuk lokasi pengungsian masyarakat lebih memilih untuk menumpang di rumah kerabat dan saudara karena jaminan ketersediaan pakaian, makanan, dan obat-obatan. Bagi masyarakat pendatang yang tidak memiliki saudara dekat maka mereka memilih mengungsi di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Tindakan yang tidak dilakukan selama bencana banjir di Desa Blang Beurandang adalah peringatan dini. Aspek peringatan dini merupakan hal penting untuk memberi peringatan kepada masyarakat untuk melakukan persiapan menghadapi bencana. Berdasarkan pengalaman masyarakat, peringatan dini banjir tidak pernah mereka dapatkan baik dari

lembaga berwenang maupun sesama warga. Masyarakat mulai bersiap saat limpasan air mulai menggenangi jalanan dan melihat intensitas hujan. Jika intensitas hujan berkurang dalam beberapa jam, maka masyarakat tidak akan melakukan persiapan evakuasi. Menurut masyarakat, seharusnya pemerintah daerah memberikan peringatan dini terhadap potensi bencana banjir bagi masyarakat Desa Blang Beurandang. Hal ini mengindikasikan bahwa peringatan dini bencana merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Dalam manajemen komunikasi risiko bencana, perlu disusun pesan yang sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat. Melalui pemenuhan informasi ini, tindakan penyelamatan diri secara mandiri oleh masyarakat dapat dioptimalkan.

Penelitian ini menemukan bahwa kebutuhan informasi masyarakat ini berguna dalam manajemen komunikasi risiko yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui identifikasi kebutuhan informasi ini, pemerintah selaku pelaksana utama dalam manajemen bencana di tingkat daerah dapat menyesuaikan pesan kepada masyarakat. Penyesuaian pesan ini dilakukan dengan mengukur tingkat kebutuhan informasi, latar pengetahuan, dan akses saluran informasi yang dimiliki masyarakat. Di samping itu, manajemen komunikasi risiko pemerintah perlu mempertimbangkan pesan-pesan khusus yang disesuaikan dengan latar belakang sosio-kultural masyarakat Desa Blang Beurandang. Pemerintah perlu melakukan reduksi terhadap informasi yang terlalu saintifik dan ambigu, sehingga menimbulkan pertentangan di masyarakat. Proses komunikasi dialogis perlu dikedepankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan bencana. Komunikasi dialogis juga dapat menjembatani ketimpangan informasi yang terjadi selama ini sehingga kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana banjir di masa depan dapat ditingkatkan.

Ketersediaan Informasi Bencana

Ketersediaan informasi bencana merupakan hal penting dalam manajemen komunikasi risiko bencana selain kebutuhan informasi. Penelitian ini berasumsi bahwa kebutuhan informasi yang tinggi perlu dipenuhi melalui ketersediaan informasi yang memadai. Masyarakat akan mencari informasi yang mereka butuhkan. Di saat informasi tersebut tersedia maka kebutuhan akan terpenuhi dan keputusan dapat dibuat secara efektif. Demikian pula sebaliknya, saat informasi yang dibutuhkan tidak tersedia maka keputusan akan sulit untuk dibuat alih-alih meningkatkan ketidakpastian dan kekhawatiran.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan informasi yang tersedia dalam dua fase bencana, yakni, (1) pada fase sebelum terjadi bencana dan (2) pada fase tanggap darurat. Pada fase sebelum bencana masyarakat menilai tidak ada informasi yang tersedia. Hanya ada papan peringatan rawan bencana banjir yang diakses oleh masyarakat. Menurut informan, ketersediaan informasi di fase pra-bencana sangat penting. Penduduk ingin mengetahui potensi bencana banjir di daerah mereka, tingkat kerawanan fisik daerah, dan langkah antisipasi apa yang perlu mereka lakukan. Di samping itu, masyarakat Desa Blang Beurandang menilai perlunya ketersediaan peringatan dini banjir. Selama ini penduduk sulit mengetahui kapan waktu evakuasi karena tidak adanya peringatan dini. Meninjau kembali kejadian banjir tahun 2020, banyak penduduk yang tidak berhasil menyelamatkan harta benda mereka karena tidak adanya peringatan ketinggian air. Peringatan dini tidak hanya berguna untuk mengoptimalkan respon, namun yang paling penting adalah penduduk mampu menggunakan waktu yang terbatas untuk melakukan evakuasi diri dan barang berharga mereka.

Pada fase tanggap darurat, informasi yang tersedia cukup memadai. Petugas penyelamat yang terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI/Polri, dan relawan secara bahu membahu melakukan evakuasi masyarakat. Penyelamatan utamanya dilakukan kepada kelompok rentan seperti lansia, perempuan, disabilitas, serta bayi dan anak-anak. Penduduk yang rumahnya digenangi air sangat dalam juga menjadi prioritas dalam penyelamatan. Pola komunikasi yang dikembangkan oleh tim pelaksana penanggulangan bencana adalah koordinasi. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk (1) menyatukan persepsi terhadap situasi yang dihadapi; (2) menyesuaikan tindakan penyelamatan yang diambil berdasarkan analisis risiko; (3) meminimalisir kesalahan tindakan penyelamatan yang berdampak lebih banyak korban; (4) memaksimalkan ketersediaan sumber daya untuk tindakan penyelamatan dalam waktu yang cepat dan tepat; (5) melakukan kajian berkala terhadap situasi bencana berdasarkan data yang terbaru sehingga didapatkan strategi penanganan yang lebih optimal; dan (6) menghindari kesimpangsiuran informasi publik khususnya terkait jumlah korban serta data kerusakan dan kerugian.

Penyediaan informasi bagi publik menjadi hal penting selama proses tanggap darurat. Menurut informan, pemerintah daerah telah menyediakan informasi selama terjadinya banjir secara cukup. Pemerintah menginformasikan mengenai lokasi pengungsian dan secara berkala menginformasikan kondisi lapangan. Bagi penduduk yang menjadi korban banjir, ketersediaan informasi berkala menjadi dasar bagi tindakan mereka selanjutnya. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah daerah untuk meminimalisir informasi keliru selama terjadinya bencana. Terlebih dengan kehadiran media sosial, risiko terjadinya disinformasi semakin tinggi. Menurut peneliti, kekhawatiran terhadap bencana tidak hanya dipengaruhi oleh tidak tersedianya informasi bencana. Di sisi lain berlimpahnya informasi dan kurangnya literasi bencana juga akan meningkatkan kekhawatiran. Berkaca dari kondisi tersebut diperlukan revisi terhadap manajemen penanggulangan bencana berbasis risiko di tingkat pemerintah daerah dengan memasukkan analisis data berbasis media sosial guna mempreventif dis-informasi yang meningkatkan ketakutan di masyarakat.

KESIMPULAN

Selama ini risiko bencana hanya menjadi domain eksklusif pemerintah dan ilmuwan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai. Pesan-pesan yang sarat dengan penggunaan istilah teknis yang dibangun oleh juru bicara pemerintah sering kali sulit dipahami oleh masyarakat awam. Akibatnya terjadi kegagalan dalam respon masyarakat saat bencana itu terjadi. Komunikasi risiko merupakan faktor penting dalam menjembatani kesenjangan yang terjadi dalam penanggulangan bencana. Komunikasi risiko yang efektif harus dilakukan secara terbuka, interaktif, dan transparan. Komunikasi pada fase bencana tidak hanya diperlukan pada saat kondisi darurat, tetapi juga penting saat sebelum dan selama bencana.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, perilaku komunikasi risiko masyarakat Desa Blang Beurandang dalam fase kesiapsiagaan banjir belum dilaksanakan optimal. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua tipe situasi dimana kebutuhan informasi risiko tinggi dan sedang. Penelitian ini menemukan bahwa kebutuhan informasi masyarakat ini berguna dalam manajemen komunikasi risiko yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui identifikasi kebutuhan informasi ini, pemerintah selaku pelaksana utama dalam manajemen bencana di tingkat daerah dapat menyesuaikan pesan kepada masyarakat. Penyediaan informasi bagi publik menjadi hal penting selama proses tanggap darurat. Oleh

karenanya, penting bagi pemerintah daerah untuk meminimalisir informasi keliru selama terjadinya bencana.

Media sosial dapat memberi warna baru dalam proses manajemen penanggulangan bencana berbasis risiko. Ketersediaan dan kebutuhan informasi di media sosial dalam fase sebelum terjadi bencana dan fase tanggap darurat dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mengetahui informasi tanpa batas perihal potensi bencana di daerah mereka, tingkat kerawanan fisik daerah, langkah antisipasi yang perlu mereka lakukan, serta ketersediaan peringatan dini bencana. Sudah saatnya pemerintah memosisikan masyarakat sebagai aktor utama dalam penanggulangan bencana khususnya pada masyarakat yang rentan, terlebih di era ekosistem komunikasi yang berkembang pesat seperti ini. Penting bagi pemerintah untuk memahami bagaimana membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat sehingga pemerintah dapat dipercaya sebagai dipercaya sebagai sumber informasi utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrams, E. M., & Greenhawt, M. (2020). Risk communication during COVID-19. *The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*, 8(6), 1791-1794.
- Adiyoso, W. (2018). *Manajemen bencana: Pengantar dan isu-isu strategis*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Aiyuda, N., & Koentjoro. (2016). Hubungan antara Persepsi Risiko dan Kepercayaan Masyarakat Terdampak terhadap Otoritas dalam Upaya Mitigasi Dampak Kabut Asap Riau. *Gajah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, 2(2), 101-112.
- Albris, K., Lauta, K. C., & Raju, E. (2020). Disaster knowledge gaps: Exploring the interface between science and policy for disaster risk reduction in Europe. *International Journal of Disaster Risk Science*, 11, 1-12.
- Alizaky, A. (2020). Bencana Alam Perspektif Al-Qur'an Analisis Kisah Nabi Nuh, Nabi Hud dan Nabi Luth (Kajian Tematik). *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-qur'an dan Tafsir*, 1(1), 55-65.
- Alfaisal, A., Syamsidik, S., & Masimin, M. (2017). Kajian Pola Sebaran Sedimen Pada Saluran Banjir Sungai Krueng Aceh. *Jurnal Teknik Sipil*, 6(3), 283-296.
- Anshori, I. (2018). Melacak state of the art fenomenologi dalam kajian ilmu-ilmu sosial. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 2(2), 165-181.
- Al Thobaity, A., Plummer, V., Innes, K., & Copnell, B. (2015). Perceptions of knowledge of disaster management among military and civilian nurses in Saudi Arabia. *Australasian Emergency Nursing Journal*, 18(3), 156-164.
- Ampou, E. E., Johan, O., Menkès, C. E., Niño, F., Birol, F., Ouillon, S., & Andréfouët, S. (2017). Coral mortality induced by the 2015–2016 El-Niño in Indonesia: the effect of rapid sea level fall. *Biogeosciences*, 14(4), 817-826.
- Annur, C. M. (2023). *Banjir sampai Kekeringan, Ini Bencana Alam di Indonesia pada 2022*. Tersedia dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/04/banjir-sampai-kekeringan-ini-bencana-alam-di-indonesia-pada-2022>. Diakses pada 10 Februari 2023.
- Asrofi, A., & Hadmoko, D. S. (2017). Strategi adaptasi masyarakat pesisir dalam penanganan bencana banjir rob dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah (Studi di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(2), 125-144.

- Badri, M., Lubis, D. P., Susanto, D., & Suharjito, D. (2018). Sistem komunikasi peringatan dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, 19(1), 1-16.
- Bahri, S. (2020). Tak Bisa Berenang, Seorang Anak di Aceh Barat Meninggal Dalam Genangan Banjir. Tersedia dalam <https://aceh.tribunnews.com/2020/07/29/tak-bisa-berenang-seorang-anak-di-aceh-barat-meninggal-dalam-genangan-banjir>. Diakses pada 25 November 2022.
- Balog-Way, D., McComas, K., & Besley, J. (2020). The evolving field of risk communication. *Risk Analysis*, 40(S1), 2240-2262.
- Chatterjee, R., Bajwa, S., Dwivedi, D., Kanji, R., Ahammed, M., & Shaw, R. (2020). COVID-19 Risk Assessment Tool: Dual application of risk communication and risk governance. *Progress in Disaster Science*, 7, 100109.
- Danar, O. R. (2020). *Disaster Governance: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Dehghani, A., Ghomian, Z., Rakhshanderou, S., Khankeh, H., & Kavousi, A. (2022). Process and components of disaster risk communication in health systems: A thematic analysis. *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 14(1), 11.
- Demeritt, D., & Nobert, S. (2014). Models of best practice in flood risk communication and management. *Environmental Hazards*, 13(4), 313-328.
- Fakhrudin, B., Clark, H., Robinson, L., & Hieber-Girardet, L. (2020). Should I stay or should I go now? Why risk communication is the critical component in disaster risk reduction. *Progress in disaster science*, 8, 100139.
- Field, R. D., Van Der Werf, G. R., Fanin, T., Fetzer, E. J., Fuller, R., Jethva, H., Levy R., Livesey, N. J., Luo, M., Torres, O., & Worden, H. M. (2016). Indonesian fire activity and smoke pollution in 2015 show persistent nonlinear sensitivity to El Niño-induced drought. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(33), 9204-9209.
- Gultom, D. I. (2016). Community-based disaster communication: how does it become trustworthy?. *Disaster Prevention and Management*, 25(4), 478-491.
- Handayani, W., Chigbu, U. E., Rudiarto, I., & Putri, I. H. S. (2020). Urbanization and Increasing flood risk in the Northern Coast of Central Java—Indonesia: An assessment towards better land use policy and flood management. *Land*, 9(10), 343.
- Hardiyanto, S., & Pulungan, D. (2019). Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 30-39.
- Haryono, S. T., Koesbardiati, T., & Kinasih, S. E. (2012). Model Strategi Mitigasi Berbasis Kepentingan Perempuan pada Komunitas Survivor di Wilayah Rawan Banjir Mitigation Strategic Model Based of Woman Needs in Survivor Community At flood areas. *Bencana Hidrometeorol*, 25.
- Hendrawan, I. G., Asai, K., Triwahyuni, A., & Lestari, D. V. (2019). The interannual rainfall variability in Indonesia corresponding to El Niño Southern oscillation and Indian Ocean Dipole. *Acta Oceanologica Sinica*, 38, 57-66.
- Hidayati, D. (2008). Kesiapsiagaan masyarakat: Paradigma baru pengelolaan bencana alam. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 3(1), 69-84.
- Hoffmann, R., & Muttarak, R. (2017). Learn from the past, prepare for the future: Impacts of education and experience on disaster preparedness in the Philippines and Thailand. *World Development*, 96, 32-51.

- Horrigan-Kelly, M., Millar, M., & Dowling, M. (2016). Understanding the key tenets of Heidegger's philosophy for interpretive phenomenological research. *International Journal of Qualitative Methods*, 15(1), 1609406916680634.
- Huurne, E. T., & Gutteling, J. (2008). Information needs and risk perception as predictors of risk information seeking. *Journal of risk research*, 11(7), 847-862.
- Jansen, T., Claassen, L., van Poll, R., van Kamp, I., & Timmermans, D. R. (2018). Breaking down uncertain risks for risk communication: A conceptual review of the environmental health literature. *Risk, Hazards & Crisis in Public Policy*, 9(1), 4-38.
- Kammerbauer, M., & Minnery, J. (2019). Risk communication and risk perception: lessons from the 2011 floods in Brisbane, Australia. *Disasters*, 43(1), 110-134.
- Kusumasari, B., & Alam, Q. (2012). Bridging the gaps: the role of local government capability and the management of a natural disaster in Bantul, Indonesia. *Natural hazards*, 60, 761-779.
- Lai, C. H., Chib, A., & Ling, R. (2018). Digital disparities and vulnerability: mobile phone use, information behaviour, and disaster preparedness in Southeast Asia. *Disasters*, 42(4), 734-760.
- Lakawa, I. (2020). Analisis Banjir Faktor Penyebab Dan Prioritas Penanganan Sungai Anduonuhu. *Sultra Civil Engineering Journal*, 1(2), 54-71.
- Lechowska, E. (2018). What determines flood risk perception? A review of factors of flood risk perception and relations between its basic elements. *Natural Hazards*, 94(3), 1341-1366.
- Lestari, P., Prabowo, A., & Wibawa, A. (2014). Manajemen komunikasi bencana merapi 2010 pada saat tanggap darurat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 173-197.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Teori Komunikasi edisi 9*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Liu, B. F., & Mehta, A. M. (2021). From the periphery and toward a centralized model for trust in government risk and disaster communication. *Journal of Risk Research*, 24(7), 853-869.
- Maarif, S., Parmono, R., Kinseng, R. A., & Sunarti, E. (2012). Kontestasi Pengetahuan dan Pemaknaan tentang Ancaman Bencana Alam: Studi Kasus Ancaman Bencana Gunung Merapi. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 3(1), 1-13.
- Macherera, M., & Chimbari, M. J. (2016). A review of studies on community based early warning systems. *Jàmbá: journal of disaster risk studies*, 8(1).
- Maidl, E., & Buchecker, M. (2015). Raising risk preparedness by flood risk communication. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 15(7), 1577-1595.
- Mane, A. (2019, June). Community Participation, Mitigation Flood Disaster in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 271, No. 1, p. 012031). IOP Publishing.
- Math, S. B., Nirmala, M. C., Moirangthem, S., & Kumar, N. C. (2015). Disaster management: mental health perspective. *Indian journal of psychological medicine*, 37(3), 261-271.
- McCaffrey, S. M., Velez, A. L. K., & Briefel, J. A. (2013). Differences in information needs for wildfire evacuees and non-evacuees. *International Journal of Mass Emergencies & Disasters*, 31(1), 4-24.
- National Academy of Sciences. 2018. "Emergency Alert And Warning Systems: Current Knowledge And Future Directions." <https://www.nap.edu/catalog/24935/emergency-alert-and-warning-systems-current-knowledge-and-future-research>.

- Nugroho, S. P. (2008). Analisis Curah Hujan Penyebab Banjir Besar di Jakarta pada Awal Februari 2007. *Jurnal Air Indonesia*, 4(1).
- Oliver-Smith, A., Hoffman, S. M., & Hoffman, S. (Eds.). (2019). *The Angry Earth: Disaster in Anthropological Perspective*. Thousand Oak: Routledge.
- Patrianti, T., Shabana, A., & Tuti, R. W. (2020). Government Risk Communication on Greenhouse Gas Emission Reduction to Tackle Climate Change. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 24(2).
- Prathumchai, K., & Bhula-or, R. (2020). Understanding Households' Perceptions of Risk Communication during a Natural Disaster: A Case Study of the 2011 Flood in Thailand. *Journal of Disaster Research*, 15(5), 621-631.
- Quin, M. (2021). Geomyths and Catfish Prints: An Analysis of the 1855 Ansei Earthquake in Japan. *Locus: The Seton Hall Journal of Undergraduate Research*, 4(1), 11.
- Rafliana, I. (2014). Pengurangan Risiko Bencana: Sebuah Restrospeksi Pasca-Tsunami Aceh 2004. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 3(1), 48-60.
- Rahman, A., Sakurai, A., & Munadi, K. (2018). The analysis of the development of the Smong story on the 1907 and 2004 Indian Ocean tsunamis in strengthening the Simeulue island community's resilience. *International journal of disaster risk reduction*, 29, 13-23.
- Renn, O., & Walker, K. (2008). Lessons learned: A re-assessment of the IRGC framework on risk governance. *Global risk governance: Concept and practice using the IRGC framework*, 331-367.
- Renn, O. (2020). Risk communication: Insights and requirements for designing successful communication programs on health and environmental hazards. In *Handbook of risk and crisis communication* (pp. 80-98). Thousand Oak: Routledge.
- Reyes, R. S., Nguyen, V. M., Schott, S., Berseth, V., Hutchen, J., Taylor, J., & Klenk, N. (2021). A research agenda for affective dimensions in climate change risk perception and risk communication. *Frontiers in Climate*, 3, 751310.
- Rosyidie, A. (2013). Banjir: fakta dan dampaknya, serta pengaruh dari perubahan guna lahan. *Jurnal perencanaan wilayah dan kota*, 24(3), 241-249.
- Salman, A. M., & Li, Y. (2018). Flood risk assessment, future trend modeling, and risk communication: a review of ongoing research. *Natural Hazards Review*, 19(3), 04018011.
- Satria, I., Azmeri, A., & Hayati, Y. (2020). Identifikasi Pola Aliran di Sekitar Daerah Genangan Banjir. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan*, 3(3), 220-226.
- Seeger, M. W. (2018). Answering the call for scholarship: The Journal of International crisis and risk communication research. *Journal of International Crisis and Risk Communication Research*, 1(1), 1.
- Sellnow, T. L., & Seeger, M. W. (2013). *Theorizing crisis communication*. New Jersey: John Wiley.
- Setiawan, D. (2021). Analisis curah hujan di Indonesia untuk memetakan daerah potensi banjir dan tanah longsor dengan Metode Cluster Fuzzy C-Means dan Singular Value Decomposition (SVD). *Engineering, Mathematics and Computer Science (EMACS) Journal*, 3(3), 115-120.
- Sjöberg, L., Moen, B. E., & Rundmo, T. (2004). Explaining risk perception. *An evaluation of the psychometric paradigm in risk perception research*, 10(2), 665-612.
- Sukino, W. G., Samad, M. A., Mangngasing, N., & Rivai, A. (2019). Manajemen Mitigasi Bencana Kota Palu Palu City Disaster Mitigation Management. *Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 1-8.

- Sutton, J., & Tierney, K. (2006). Disaster preparedness: Concepts, guidance, and research. *Colorado: University of Colorado*, 3(1).
- Swann, C., Crust, L., & Allen-Collinson, J. (2016). Surviving the 2015 Mount Everest disaster: A phenomenological exploration into lived experience and the role of mental toughness. *Psychology of Sport and Exercise*, 27, 157-167.
- Tanggap, F., Juneng, L., & Aldrian, E. (2017). Observed changes in extreme temperature and precipitation over Indonesia. *International Journal of Climatology*, 37(4), 1979-1997.
- Utami, D. R. R. B., Sari, D. K., Wulandari, R., & Istiqomah, A. R. (2021). Kesiapsiagaan Bencana Banjir Masyarakat Dusun Kesongo. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 17(1), 01-07.
- Wardyaningrum, D. (2016). Modal sosial inklusif dalam jaringan Komunikasi bencana. *Jurnal Aspikom*, 3(1), 33-55.
- Winoto, P. M. P., & Zahroh, C. (2020). Pengaruh Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana Melalui Metode Simulasi Terhadap Peningkatan Ketrampilan Dalam Menghadapi Bencana Pada Mahasiswa Siaga Bencana (Magana) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. *Journal of Health Sciences*, 13(2), 157-164.
- Xu, D., Peng, L., Liu, S., & Wang, X. (2018). Influences of risk perception and sense of place on landslide disaster preparedness in southwestern China. *International Journal of Disaster Risk Science*, 9, 167-180.
- Yudarwati, G. A., Putranto, I. A., & Delmo, K. M. (2022). Examining the Indonesian government's social media use for disaster risk communication. *Asian Journal of Communication*, 32(1), 1-20.
- Zevri, A. (2020). Analisis Rencana Tinggi Tanggul Banjir DAS Bangkatan Sebagai Alternatif Pengendalian Banjir Kota Binjai. *Jurnal Sumber Daya Air*, 16(2), 63-76.